

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Lindung Kasinan

Dari sekian banyak jenis hutan di Indonesia Pemerintah telah memfungsikan tiap-tiap hutan sesuai dengan karakter hutan itu sendiri seperti hutan produksi yang memberikan sumber daya alamnya untuk peningkatan ekonomi, hutan lindung berfungsi untuk sumber penyedia air dan pencegah bencana. Seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tak dapat dipisah. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan produksi dalam PP Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Secara geografis hutan lindung kasinan terletak di Kota Batu, namun secara administratif dikelola oleh Perhutani KPH Malang. Pengelolaan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang berada di bawah manajemen Divisi Regional Jawa Timur yang secara administratif terletak di dua kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri serta satu Pemerintahan Kota Batu. Luas kawasan hutan yang dikelola KPH Malang yaitu 90.360,80 Ha yang terdiri dari hutan produksi 46.195,90 Ha dan hutan lindung 44.164,90 Ha. Berdasarkan Klas Perusahaan (1) Klas Perusahaan Jati: 40.521,3 Ha, (2) Klas Perusahaan Pinus: 27.621,6 Ha, (3) Klas Perusahaan Damar: 22.217,9 Ha.

Berdasarkan pemantauan hutan di wilayah KPH Malang ditemukan beragam jenis flora dan fauna, dengan jumlah total keseluruhan yang ditemukan:

Tabel 3. jumlah flora dan fauna

No.	Pemantauan	Realisasi
1.	Satwa Liar	Telah ditemukan 66 jenis satwa liar yang terdiri dari 16 jenis mamalia, 42 aves (burung) dan 8 jenis herpefauna.
2.	Satwa RTE	Ditemukan 8 jenis mamalia, 3 jenis harpeto dan 14 jenis aves.
3.	Vegetasi (struktur dan keanekaragaman)	KPH Malang mempunyai 235 jenis tumbuhan bawah, 150 jenis semai, 170 jenis paancang, 81 jenis tiang, dan 41 jenis pohon.

Sumber: KPH Malang 2017

Sedangkan mengenai kawasan perlindungan KPH Malang ditetapkan sebesar 44.164,90 Ha atau 48,49% dari total luas pengelolaan (90.360,80 Ha). Sedangkan untuk wilayah hutan lindung di Kota Batu menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu terdapat 2.970 Ha ini dibagi dalam 3 Kecamatan diantaranya Kecamatan Batu seluas 387 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 918 Ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 1.664 Ha.

Berdasarkan hasil survey KPH Malang terdapat kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terbagi dalam beberapa kelompok antara lain:

- a. NKT 1: Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alam.

Unit manajemen hutan menyediakan pasokan pasokan utama kebutuhan air minum. Dalam kawasan hutan KPH Malang ditemukan pasokan mata air. mata air ini merupakan pemasok kebutuhan air minum dan MCK bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan KPH Malang, dan bila mata air ini rusak masyarakat tidak lagi memiliki sumber alternatif pasokan air lainnya.

- b. NKT 2: kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal

Masyarakat local menggunakan unit manajemen hutan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau mata pencaharian. Peranan penting sumber daya hutan KPH Malang dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau mata

pencaharian terletak pada nilai-nilai dalam kegiatan tanaman sistem tumpang sari dan PLDT, pemenuhan kebutuhan kayu bakar dan pemenuhan kebutuhan hijauan makanan ternak bagi masyarakat sekitar hutan.

- c. NKT 3: kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal

Masyarakat setempat menganggap bahwa hutan merupakan bagian yang sangat penting. Di wilayah KPH Malang ditemukan situs sebanyak dua buah ekologi yaitu pantai sendang biru dan pulau sempu. Sedangkan ada banyak candid an tempat pemujaan lainnya situs budaya dan religi, dimana semuanya belum diidentifikasi dengan baik dan juga belum di tata batas secara permanen, akan dilakukan monitoring oleh manajemen KPH Malang dalam kelola lingkungan dan sosial.

Makhrus Umar seorang tokoh masyarakat dari Desa Pesanggrahan menceritakan bahwa dahulu kala, jejak geologis kasinan adalah alur gundul kering jejak banjir besar yang berhulu di kawah gunung kawi, seperti halnya jejak letusan gunung api yang ada. Namun sejalan dengan tidak aktifnya gunung kawi tumbuhlah kayu perlahan membesar merapat menahun menjadi hutan untuk menyimpan air hujan dalam pori-pori tanahnya dan menahan sedikit-demi sedikit airnya membaginya perlahan menjadi sumber air, berhimpun terus menerus membesar menjadi sungai bernama sungai gelenter yang dulu sempat mengakomodasi kebutuhan warga.

Kasinan adalah jurang yang menganga di belakang salah satu dusun di Desa Pesanggrahan sebagai jejak banjir gunung kawi di masa lampau ketika gunung masih aktif, hal ini seperti gunung kelud dan gunung merapi ketika meletus. Namun sekarang menjadi kawasan geohidro atau kawasan sumber yang urat airnya merayap sampai gunung kawi. Warga menambahkan dahulu di tahun 1980-an pernah terjadi banjir dahsyat, dan di tahun 2000-an banjir kecil masih sampai ke balai kota lama. Mengenai jejak geososial sejak dahulu kala kasinan secara tradisional penyedia untuk menyelenggarakan kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, sawah dan ternak. Sekitar tahun 1977 warga

mulai memanfaatkan air bersihnya dengan menggunakan untuk tempat ibadah di Desa Pesanggrahan yaitu masjid Nurul Hidayah. Namun sejak tahun 1980 hingga kini konflik horizontal sering bereskalasi, baik antar warga dengan warga, antar warga dengan properti perairan, semua soal kebutuhan air yang tak tercukupi dan mengkhawatirkan. Lalu di tahun 1987 warga mulai menanam pohon tegakan kawasan kasinan yang kala itu masih berupa semak belukar. Sekitar tahun 1990 ada 40 titik babakan atau pet umum dan tempat ibadah di seluruh Desa Pesanggrahan yang bisa dijangkau airnya. Tahun 2000 kelompok hipam mulai bermunculan untuk memenuhi kebutuhan air minum kelompok warganya dikarenakan mulai kesulitan air bersih. Sekitar tahun 2010 rekonstruksi kasinan mulai tampak hasilnya hingga seperti sekarang mulai rimbun tegakan sampai pada titik setiap orang yang bila berada dalam kawasan ini merasa tercurigai namun pada akhirnya air mulai ramah kembali untuk pertanian dan peternakan maupun air untuk warga. Kurang lebih 80% warga pesanggrahan menggantungkan kebutuhan airnya dari ketersediaan air kasinan.

Dari penjabaran sumber yang telah penulis dapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih beragam flora yang tumbuh di hutan lindung kasinan sehingga mampu menjaga rantai makanan fauna di lokasi hutan. daya tampung dan daya dukung hutan lindung kasinan masih sangat mendukung untuk keamanan dan menopang kebutuhan warga sekitar hutan.

2.2 Konflik Lingkungan

Konflik telah terjadi sejak dahulu kala, dimana setiap manusia memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda dengan manusia lainnya sehingga dalam merealisasikan tujuannya terkadang bertentangan dengan tujuan manusia lainnya. Konflik mempunyai banyak jenis, beberapa diantaranya ada konflik keluarga, konflik antar golongan, konflik antar instansi, konflik politik, konflik ekonomi, konflik agama, hingga konflik lingkungan. Para ahli mendefinisikan konflik cukup beragam, Miall (2000) mendefinisikan sebagai ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul

bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Mitchell *et al* (2003) juga turut menjelaskan bahwa konflik merupakan sesuatu yang selalu ada atau inheren dalam masyarakat. Ini artinya konflik ada di sekitar kita atau bahkan pada diri kita sendiri, dimana setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Banyak dari beberapa orang menganggap bahwa konflik adalah lawan dari persatuan. Mengutip penjelasan Johnson (1986) dari titik pandangan sosiologi, lawan dari persatuan bukanlah konflik tetapi ketidak terlibatan (*noninvolvement*, artinya tidak ada satupun bentuk interaksi timbal-balik). Untuk menunjukkan bagaimana konflik alamiah itu ada dalam kehidupan sosial, Simmel dalam Johnson (1986) memberikan beberapa contoh yang memperlihatkan bahwa individu-individu tidak hanya sekedar mau untuk melibatkan diri dalam konflik, tetapi mereka juga kelihatannya bersemangat untuk berkonflik. Jika isu-isu yang penting itu tidak ada, orang-orang mau berkonflik karena isu-isu yang sepele. Misalnya, Simmel mengutip kasus percekcoakan antara dua partai di Irlandia yang melibatkan seluruh Negeri, tentang warna seekor sapi.

Simmel dalam Johnson (1986) juga membedakan antara konflik orang per orang secara langsung dan persaingan. Persaingan tidak perlu mencakup kontak antar pribadi secara langsung. Namun sebaliknya, mereka yang bersaing mungkin berjuang sendiri-sendiri untuk suatu tujuan bersama, dengan antagonism yang muncul dari kenyataan bahwa keuntungan bagi seseorang berarti kerugian bagi pihak lain. Tetapi dalam beberapa bentuk persaingan, mereka yang kalah sekalipun mungkin akhirnya akan memperoleh keuntungan secara tidak langsung melalui kemenangan dari mereka yang menang. Contoh dalam hal pandemi covid-19 sekarang, persaingan antara para ilmuwan atau dokter untuk penemuan-penemuan baru mengenai vaksin covid-19 menghasilkan kemajuan ilmu itu pada umumnya, dan dari kemajuan ini semua ilmuwan merasakan keuntungannya.

Maring (2013) dalam (Senoaji, *et al.* 2020) menjelaskan bahwa konflik tenurial penguasaan hutan digambarkan sebagai fenomena yang terjadi akibat dominasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sehingga melahirkan

perlawanan masyarakat. Sylviani & Hakim (2014), Susilowati (2015) dalam Aneng (2021) menjelaskan lebih detail bahwa tenurial memiliki arti memelihara, memegang dan memiliki, berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan. Marina & Dharmawan (2011), Ambarwati *et al.* (2018), Aneng *et al.* (2021) juga menjelaskan alasan kawasan hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antara pribadi maupun konflik dengan institusi Negara atau perusahaan.

Salah satu produk lingkungan hidup yang paling inti dibutuhkan manusia adalah air. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan menjelaskan hutan lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, pada Pasal 6 menjelaskan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pengaturan tata-air pencegah bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Anonim, 1967).

Shiklomanov (1993) dalam (Jocom, *et al.* 2016) memprediksi pada tahun 2025 sebagian besar penduduk bumi akan hidup di dalam kondisi kekurangan air. Selanjutnya Shiklomanov (1993) menjelaskan bahwa total volume air di bumi berjumlah 1.400 juta km³ dimana hanya 2,5% atau sekitar 35 juta km³ adalah air, sebagian berbentuk es dan salju terperangkap di antartika dan Greenland atau dalam air bawah tanah. Sedangkan sumber air yang dimanfaatkan manusia adalah sungai, danau, dan air bawah tanah yang membentuk kolam. Porsi pemanfaatan sumber ini hanya sekitar 200.000 km³ dari jumlah air yang tersedia – kurang dari 1% dari jumlah air dan hanya 0,01% dari jumlah air yang berada di bumi. Thomas F. Homer-Dixon (1991) menyatakan dimana perubahan lingkungan bisa mengakibatkan konflik seperti meningkatnya suhu panas bumi dan akan berpengaruh pada para petani misalnya, dan berdampak pada perekonomian jika terjadi gagal panen, salah satunya perubahan lingkungan akan memunculkan hujan asam, pemanasan

global dsb. Beberapa pakar berpendapat bahwa perubahan lingkungan dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara Negara-negara secara resimen atau secara global, menghasilkan ketidak stabilan yang dapat menuntun pada peperangan. Dari sini dapat dipahami bahwa persoalan lingkungan jika pengelolaannya kurang tepat maka dampaknya tidak hanya pada pencemaran namun juga berujung konflik yang bahkan berujung pada kekerasan.

Maka sebagaimana penjelasan diatas air adalah sumber kehidupan yang mutlak, sangat urgent untuk mendukung kegiatan ekologi dan sosial. Saat mendekati abad kedua puluh satu, air dan pasokan air sistem semakin cenderung menjadi tujuan aksi militer dan instrument perang seiring bertambahnya populasi manusia, seiring dengan meningkatnya standart hidup, maka juga meningkatkan permintaan akan air tawar, dan arena perubahan iklim global membuat pasokan dan permintaan air semakin bermasalah dan tidak menentu (Gleick, 1993).

Garis besar dari hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa permasalahan kelangkaan air disebabkan oleh dua hal yaitu lingkungan dan manusia. Faktor lingkungan disebabkan oleh iklim yang menyebabkan kekeringan di wilayah tertentu dengan karakteristik masuk dalam wilayah kering (arid/semi-arid), sehingga pada musim-musim tertentu akan terjadi kekeringan. Pasokan air yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, pertanian, dan industri. Sedangkan factor manusia disebabkan oleh aktivitas ekonomi maupun perilaku yang menyebabkan daur hidrologi air terganggu, dan eksploitasi manusia dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya (Hary *et al.* 2016).

2.3 Analisis Konflik

Analisis memberikan dasar untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelola konflik (Carpenter & Kennedy, 1981). Sedangkan analisis konflik dapat berfokus pada tema seperti aktor, akar penyebab, proses eskalasi, pendekatan manajemen konflik, hasil dari upaya manajemen konflik, dan dampak konflik (Pondy 1976, Pruitt and Rubin 1986, Escobar 2006, Yasmi 2007, Yasmi *et al.* 2012). analisis konflik merupakan alat analisis

terhadap konflik meliputi konteks, pemetaan dan dinamika konflik. Dalam penelitian ini akan menjelaskan analisis konflik pragmatis seperti yang ditulis oleh Susan (2019) yang meliputi teknik pemetaan konflik, jenis dan tipe konflik, dinamika dan intervensi konflik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Pemetaan Konflik

Langkah awal dalam proses analisis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ada banyak pakar yang menyampaikan teknik pemetaan konflik, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan pemetaan yang dikemukakan oleh Wehr dan Bartos:

- ***Specify the Context***, yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik, bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruangan yang kosong, konflik adalah pertikaian antar manusia, bisa muncul dalam konteks keluarga, perusahaan, komunitas etnis, agama hingga Negara.
- ***Identify the Parties***, mengidentifikasi/menemukan siapa yang menjadi pihak-pihak berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan koersif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Namun pihak yang ketiga adalah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.
- ***Separate Cause From Consequences***, seorang peneliti konflik perlu menisbatkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik. Sebagai contoh, sebab konflik antara buruh

dengan *stakeholder* adalah karena ekonomi, buruh merasa mendapatkan gaji yang minim dan tidak sepadan dengan pengorbanan kerja setiap harinya akibat konfliknya adalah buruh menuntut upah yang sepadan dengan cara demo atau mogok kerja. Contoh berikutnya, penyebab konflik suami dan istri adalah masalah ekonomi, dan akibat konflik adalah saling menyalahkan atau menyesal keputusan menikah.

- ***Separate Goals From Interest***, goals adalah sasaran selama proses konflik, lebih spesifik. Misalnya tujuan salah satu pihak selama konflik adalah meminta lawannya menyerahkan senjata sehingga tidak perlu ada kekerasan lagi. Seperti permintaan Pemerintah Indonesia terhadap kelompok separatis GAM Aceh. Sentral Informasi Rakyat Aceh (SIRA) meminta referendum kepada Pemerintah Indonesia, bisa dinilai sebagai tujuan. Sedangkan kepentingan adalah konsekuensi secara keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh seluruh pihak terlibat. Misalnya GAM berkepentingan untuk merdeka setelah konflik dengan Pemerintah Indonesia.
- ***Understand the Dynamics***, dinamika adalah perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik.
- ***Search for Positive Functions***, adalah menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaian.
- ***Understand the Regulation Potential***, bagaimana aturan yang legal, contoh di Indonesia seperti Perda atau undang-undang, bisa mengintervensi atau menggawangi proses konflik.

2.3.2 Jenis dan Tipe Konflik

Pada umumnya ada dua jenis konflik, yang pertama dimensi vertikal atau konflik atas yang dimaksud adalah konflik antara elite dan

masyarakat (massa). Contoh yang dimaksud elite disini para pengambil kebijakan di tingkat pusat atau Daerah. Hal yang menonjol dalam konflik ini yaitu digunakan instrument kekerasan Negara, sehingga timbul korban di kalangan masyarakat. Yang kedua konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri. Selain jenis konflik, kita perlu mengenal istilah tipe konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku, dan situasi yang ada. Tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan (Susan, 2019).

- Tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok masih bisa saling memenuhi dan damai. Namun tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.
- Berikutnya konflik laten yaitu suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu di angkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis bukan jaminan bahwa di dalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan. Kenyataan ini bisa kita temukan dalam masyarakat Orba. Masyarakat Orba tampak harmonis, damai, kecil tingkat pertentangan diantara masyarakat. Akan tetapi dibalik stabilitas, keharmonisan, dan perdamaian itu ternyata terdapat konflik laten dalam dimensi etnis, keagamaan dan separatism.
- Konflik terbuka adalah situasi dimana konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Pada situasi konflik terbuka muncul pihak-pihak berkonflik

yang semakin banyak dan aspirasi yang berkembang cepat bagaikan epidemic.

- Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalah pahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka). Contoh dari konflik di permukaan ini bisa kita lihat perkelahian antar-SMA. Konflik kekerasan yang muncul seringkali hanya disebabkan oleh kesalah pahaman komunikasi. Saling melirik ketika di antara mereka berpapasan di jalan bisa menjadi permasalahan yang berkembang ke tawuran massal.

2.3.3 Wacana dan Dominasi

Situasi konflik sering menciptakan diskursus atau wacana dari para aktor konflik sehingga analisis terhadap wacana menjadi sangat penting. Persoalan wacana adalah kepentingan apa dan siapa yang mendominasi di dalamnya. Negara, menurut Berger dan Luckman (1966) dalam Susan (2019) adalah lembaga terbesar yang paling kuat dalam menanam kepentingan di wilayah public. Negara mempunyai aparat-aparat, seperti birokrasi dan militer yang merupakan kekuatan untuk memaksa sehingga dapat membentuk atau menentukan realitas sosial dalam koridor kepentingan mereka. Berger dan Luckman (1966) menunjuk Negara sebagai lembaga kekuasaan yang paling besar dalam menentukan wacana individu-individu.

2.3.4 Dinamika dan Intervensi Konflik

Langkah selanjutnya setelah pemetaan konflik yaitu menganalisis dinamika konflik. Kunci memahami dinamika konflik pertama yakni dengan melihat sumber konflik, yaitu segala potensi yang diinginkan oleh subjek kepentingan. Potensi itu antara lain sumber daya alam, perbedaan tafsir agama, atau etnis. Kemudian setelah melihat sumber konflik, kita perlu menganalisis karakter hubungan (*relationship*) diantara berbagai pihak berkonflik pada setiap kasus tentu memiliki

hubungan kekuasaan yang berbeda. Sehingga menjadi penting bagi seorang analis konflik melihat model hubungan kekuasaan yang ada setelah melihat konteks dan model hubungan kekuasaan, analisis dinamika melihat pada penahapan konflik. Penahapan konflik melihat pada kualitas dan kuantitas model tindakan pihak berkonflik. Adapun menurut Fisher (2001) tahapan dinamika konflik meliputi:

- **Pra-konflik** adalah periode dimana terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
- **Konfrontasi** melihatkan satu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Lading pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak.
- **Krisis** adalah puncak dari konflik. Tahap dimana konflik pecah bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara massal. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak ada yang terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa jadi salah satu pihak memenangkan peperangan sedangkan pihak lain kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*) kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Pada beberapa kasus strategi *contending* yang menghasilkan penerapan hasil kalah menyebabkan kerugian besar. Pada tahap ini

tingkat kekerasan menurun dengan disertai menurunnya berbagai bentuk konfrontasi pihak-pihak berkonflik, ditariknya kekuatan-kekuatan bersenjata, dan mulai munculnya inisiatif resolusi konflik.

- **Pascakonflik** adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua belah pihak.

2.4 Manajemen Konflik

Hadi (2010) menjelaskan mengenai penyelesaian konflik lingkungan atau sengketa lingkungan lebih luas cakupannya dalam arti bukan hanya karena adanya pencemaran dan kerusakan tetapi juga perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan, perebutan hak pemanfaatan. Sedangkan mengenai konflik lingkungan pun tidak hanya konflik yang sering kita dengar di Negara kita saja (konflik lokal), namun konflik antar Negara mengenai lingkungan pun juga terjadi seperti kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dimana asapnya merambah sampai Singapura dan Malaysia. Perkembangan terakhir, Singapura akan membawa persoalan ini pada sidang PBB (Hadi, 2014). Dari sini kita memahami bahwa konflik lingkungan adalah konflik sosial yang berhubungan atau memperebutkan lingkungan dimana konflik lingkungan muncul karena salah satu pihak merasa dirugikan karena lingkungannya rusak dikarenakan kegiatan/proyek tertentu, atau mungkin karena memperebutkan hak guna lahan yang dirasa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Astri (2012) dalam Palmolina & Fauziah (2020) berpendapat mengenai langkah penyelesaian konflik di suatu daerah hendaknya mencermati dan menganalisis paradigma lokal dan obyektifitas agar tetap berada di dalam bingkai kondisi, nilai dan tatanan kehidupan masyarakat setempat. Sriyanto (2007) dalam Palmolina & Fauziah (2020) menjelaskan karena pada umumnya masyarakat masih memegang teguh adat lokal dan sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat, sehingga model penyelesaian sengketa idealnya disesuaikan

dengan kondisi dan budaya setempat.

Maka untuk menyelesaikan suatu permasalahan, akan lebih mudah jika memahami tiap-tiap karakter pihak yang bersengketa. Ini bisa dengan cara memetakan gaya bersengketa setiap pihak. Hal ini juga ditujukan agar permasalahan tidak semakin parah dan mudah ditangani. Untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa, akan lebih mudah jika dilakukan analisis gaya bersengketa (AGATA). Terdapat 5 gaya dalam bersengketa. Diantaranya ada gaya (1) saling menghindar, (2) akomodatif, (3) kompromistis, (4) kompetitif, dan (5) kolaborasi. Isenhardt dan Spangle (2000) dalam Pasya (2017) menjelaskan lebih rinci mengenai 5 gaya diatas antara lain:

1. Gaya saling menghindar, gaya ini terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya konflik, mengubah topik penyebab konflik ke topik lainnya yang bukan penyebab konflik, menghindari diskusi, dan berperilaku *non-committal* atau tak ingin membangun komitmen. Gaya seperti ini efektif saat situasi terdapat bahaya kekerasan fisik, tidak adanya kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang sangat rumit dan tidak memungkinkan upaya penyelesaian dilakukan.
2. Gaya akomodatif, atau gaya akomodasi ini terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Gaya ini efektif ketika situasi satu pihak menyadari bahwa tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya, atau meyakini bahwa memuaskan kepentingan kelompoknya akan berakibat merusak hubungan dengan kelompok lain.
3. Gaya kompromistis atau gaya kompromi terjadi ketika masing-masing pihak bertindak untuk bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya melalui konsesi, dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang dan siapa siapa yang kalah. Gaya seperti ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak untuk bekerja sama sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian

yang penting. Dalam gaya ini lazimnya tidak dicapai kepuasan yang sejati.

4. Gaya kompetitif, atau gaya kompetisi merupakan gaya konflik yang ciri tindakannya bersifat agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu, salah satu pihak tidak merasa rugi walau harus menekan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan dan tatanan sosial.
5. Gaya kolaborasi yaitu suatu gaya yang dicirikan oleh saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak dan kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati dan berupaya untuk saling memuaskan kepentingan dan kepedulian seluruh pihak yang bersengketa. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan tersedianya waktu dan energi yang cukup untuk menciptakan penanganan konflik secara terpadu.

2.5 Pemecahan Konflik

Konflik adalah unsur alami dari masyarakat bebas namun terkadang dibutuhkan untuk membawa perubahan yang diperlukan. ROMCOE (organisasi spesialis yang fokus di bidang manajemen konflik lingkungan di Amerika) mengakui pentingnya konflik dan tidak mengusulkan agar manajemen konflik digunakan untuk menekan atau menghindari konfrontasi atas perbedaan kepentingan yang sah (Carpenter & Kennedy, 1981). Louis D. Brandeis, seorang arbiter yang terkenal di Amerika pernah berkata bahwa sembilan persepuluh dari kontroversi serius yang muncul dalam kehidupan adalah hasil dari kesalahpahaman, hasil dari satu orang tidak mengetahui fakta-fakta yang menurut orang lain tampak penting, atau gagal dalam menghargai sudut pandangnya (Carpenter & Kennedy, 1981).

Pada akhir tahun 1960-an, terdapat pendekatan yang agak unik untuk analisis proses konflik yang dikembangkan yaitu lokakarya pemecahan masalah. lokakarya ini dirancang untuk melayani dua fungsi, yang pertama

untuk memberikan peneliti konflik kesempatan untuk menyelidiki dinamika konflik internasional yang sedang berlangsung, yang kedua untuk menyediakan tempat di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat bertemu dan mempelajari teknik-teknik yang memungkinkan mereka pada akhirnya menyelesaikan konflik secara damai (Hill, 1982). Namun sekarang ada enam pendekatan umum yang biasa dijelaskan dalam literatur manajemen konflik antara lain: negosiasi, mediasi, adjudikasi, arbitrase, paksaan, dan penghindaran. Empat strategi pertama mengharuskan kedua belah pihak menyetujui tindakan, sedangkan dua yang terakhir diputuskan secara sepihak oleh satu pihak (Isenhardt dan Spangle 2000, Engel dan Korf 2005, Yasmi *et al.* 2012). Simmel dalam (Johnson, 1986) menganalisa beberapa bentuk atau cara mengakhiri konflik, termasuk menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian, dan ketidak mungkinan untuk berdamai. Kemenangan satu pihak tidak selalu berarti bahwa pihak yang kalah sama sekali kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang. Pihak yang kalah mungkin dengan bebas memilih untuk menyerah setelah mereka merasa bahwa hasilnya tidak bisa lain lagi.

Maka dengan demikian pihak yang kalah terhindar dari aktivitas yang membuang tenaga, suatu hal yang sia-sia, melarutkan diri terhadap hal yang mungkin tidak akan ada habisnya karena antar pihak akan selalu berusaha untuk memenangkan konflik. Kompromi kelihatannya tidak mungkin terjadi apabila obyek konflik itu tidak dapat dibagikan (artinya tidak dapat dibagi di antara pihak-pihak yang berkonflik). Tetapi Simmel (1986) menunjukkan bahwa pun dalam kasus-kasus seperti itu, kompromi dapat tercapai dengan memberikan suatu hadiah “hiburan” kepada pihak yang menderita kekalahan. Sesungguhnya konflik dapat diatasi oleh satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan sebagai contoh dalam konflik pembangunan pabrik misalnya, pembangunan pabrik yang besar pasti membutuhkan lahan yang luas, hal ini biasanya mengharuskan pembebasan lahan warga, maka sudah pasti melahirkan konflik dimana warga yang sudah nyaman di tempat mereka dan

bekerja di tempat mereka harus pindah ketempat lain yang belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sama. Maka pihak investor yang mendirikan pabrik tersebut seharusnya mengganti pekerjaan para warga misalnya dengan cara merekrut warga tersebut sebagai buruh pabrik ketika pabrik sudah beroperasi dan mengganti rumah mereka. Namun Awang (2007) dalam Palmolina & Fauziyah (2020) menyampaikan hal yang menarik mengenai konflik lingkungan bahwa konflik sumberdaya hutan merupakan satu hubungan antara dua atau lebih pihak-pihak yang tidak sepaham baik ditandai dengan kekerasan atau tidak, didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang nyata dan yang dirasakan dalam hal pengetahuan, peraturan, kepentingan dan pemanfaatan, sehingga sering menimbulkan kerusakan. Maka dalam konflik sumberdaya alam, sebenarnya semua pihak menang kecuali hutan itu sendiri.

